



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MUSI BANYUASIN

LKjIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) 2024



Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun Anggaran 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-NYA, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 dapat tersusun. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini berdasarkan Instruksi Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi, maka disusunlah Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024.

Semoga (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 ini dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja yang nantinya akan diperoleh manfaat umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja pada masa yang akan datang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna oleh karena itu saran dan kritik dari semua pihak sangat kami harapkan demi kesempurnaan laporan di masa mendatang. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita sekalian dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada agama, nusa dan bangsa. Amin

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 - 2026.

LKjIP juga sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi DINKOMINFO menuju terwujudnya good governance yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahun 2024 yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi	4
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.3 Sistematika Penyajian	7
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Reviu Rencana Strategis 2023 – 2026	8
2.2 Indikator Kinerja Utama	13
2.3 Penetapan Kinerja	14
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Metodologi Pengukuran Pencapaian Kinerja Tahun 2024 ...	16
3.2 Analisis Atas Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2024	19
3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja	39
3.4 Akuntabilitas Keuangan	40
 BAB IV PENUTUP	 44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) memiliki 3 landasan utama yaitu : Transparansi, Akuntabilitas dan partisipasi Akuntabilitas dalam hal ini merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk mencapai Kinerja Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Komunikasi dan Informatika selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai sub sistem dari system dari system Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. serta fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai sub sistem dari system Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Oleh karena itu sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi maka perlu menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di akhir tahun pelaksanaan kinerja selama tahun 2024 sesuai dengan program/kegiatan yang tertuang dalam rencana Kerja Tahun 2024, sehingga LKjIP merupakan sarana pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai tolak ukur dalam rangka LKjIP meningkatkan kinerja pelayanan bidang Komunikasi dan Informatika kepada masyarakat.

Dalam Rangka mewujudkan hal tersebut maka pemerintah menetapkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2006 tentang laporan keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah, Selanjutnya sebagai tindak lanjut Instruksi presiden tersebut, Kepala lembaga Administrasi Negara (LAN) menetapkan pedoman penyusunan pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana bagian dan Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP) pada hakekatnya merupakan sinergi dari akuntabilitas manajerial, akuntabilitas proses dan akuntabilitas program yang saling mendukung dan saling terkait satu sama lain. Akuntabilitas manajerial menitikberatkan pada efisiensi, efektivitas dan kehematan dalam penggunaan dana harta kekayaan, sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Akuntabilitas proses menitikberatkan pada kebutuhan terhadap peraturan perundang – undangan dalam pelaksanaan kegiatan – kegiatan untuk pencapaian misi organisasi. Sedangkan akuntabilitas program pada dasarnya memberikan perhatian yang besar pada pencapaian hasil kegiatan instansi pemerintah. Dalam hal ini seluruh aparatur pemerintahan berkemampuan untuk mencapai hasil sesuai dengan misi yang diembannya, bukan hanya sekedar patuh terhadap kebutuhan hirarki atau prosedur.

Pelaksanaan akuntabilitas instansi pemerintah yang beraneka ragam dan kompleks memerlukan dukungan suatu system yang dapat menjamin penggunaan sumber – sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang – undangan dan kebijakan yang berlaku, aman dari tindakan pemborosan, kerugian dan penyalagunaan serta menjamin tersedianya data yang dapat dipercaya (akurat) dan dapat diungkapkan secara memadai dalam suatu laporan secara berkala dan melembaga. Selain itu, perlu pula diungkapkan proses pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan dengan dinamika interaksinya dengan lingkungan.

Dengan demikian, dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah, para pejabat dan pegawai yang berwenang diharuskan tidak saja bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang

berlaku, tetapi juga bertanggung jawab pada peningkatan kompetensi professional dan daya saing melalui berbagai pengembangan kebijakan dan program secara efisien dan efektif LKjIP DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2024 atas sumber daya dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, dalam pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah diperlukan suatu perubahan fokus/orientasi manajemen instansi pemerintah yang semula lebih berfokus pada kegiatan yang terkait dengan keluaran (output) menjadi kegiatan – kegiatan yang lebih dihubungkan dengan hasil (result/outcome) yang diperoleh.

Akuntabilitas kinerja dimaksud harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan. Di samping itu, harus pula menyajikan penjelasan tentang deviasi antara yang telah ditetapkan dengan realisasi kegiatan yang dicapai. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah tersebut diperlukan pola pengukuran kinerja yang dimulai dari perencanaan strategik dan berakhir pada pengukuran kinerja atas kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan.

Penyajian laporan Akuntabilitas ini didasarkan peraturan Menteri Negara pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 63 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Pemerintah Daerah. Didalamnya memuat unsur – unsur Perencanaan Strategis dan Evaluasi serta analisis pencapaian kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2024.

1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai tugas yaitu :

- (1) Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian berdasarkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 276 Tahun 2021;
- (2) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Untuk menyelenggarakan tugasnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk database serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan;
- b. Perencanaan strategis pada dinas komunikasi dan informatika;
- c. Perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian;
- e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian;
- f. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian;
- g. Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan pada bidang komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian;
- h. Penyelenggara kesekretariatan dinas komunikasi dan informatika;
- i. Pemberian rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pelayanan bidang komunikasi dan informatika;
- j. Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

KEPALA DINAS

HERRYANDY SINULINGGA, AP
NIP. 19750302 199402 1 002

SEKRETARIS

DAUD AMRI, SH
NIP. 197512292003121005

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL TERTENTU

PERENCANA AHLI MUDA

NIP -

KEPALA SUBBAGIAN UMUM
DAN KEPEGAWAIAN

APRIZAL, SH
NIP. 19860401 201001 1 001

ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN
DAERAH AHLI MUDA

RINI DEWI ANGGRAINI, SE, M.Si
NIP. 19780414 199803 2 003

KABID INFORMASI PUBLIK

FRANS GUSTIAN, S.T., M.Si
NIP. 19760818201101 1 001

KABID KOMUNIKASI PUBLIK

ACHMAD KARTIKO BUWONO, SE, M.Si
NIP. 19690322 200212 1 002

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

WELLY HENDERZON, SE, M.Si
NIP. 19810924201001 1 001

PRANATA HUMAS AHLI MUDA

MEITA ARIANSI, SE, M.Si
NIP. 19850508 201001 2 001

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

ELVA, SE
NIP. 19781109 200901 2001

PRANATA HUMAS AHLI MUDA

SLAMET RIANTO, SE, M.Si
NIP. 19730618 200701 1 002

PRANATA HUMAS AHLI MUDA

MUHAMMAD YUSUF, SH, I
NIP. 19780707 201001 1 015

PRANATA HUMAS AHLI MUDA

-

KABID APLIKASI dan INFORMATIKA

SUMARLIN, S.Pd
NIP. 19830317 2009041001

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

NIP -

KASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

NIP -

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

YULIASTY, S.STP., M.Si
NIP. 19830731 200212 2 001

KABID STATISTIK SEKTORAL

DELA NOVITA SARI, S.T
NIP. 197811242008012003

STATISTISI AHLI MUDA

PANGKU, SE, M.Si
NIP. 19670625 198808 1 001

STATISTISI AHLI MUDA

MUSTITTO, S.Pd
NIP. 19750504 200801 1 003

STATISTISI AHLI MUDA

NIP -

KABID PERSANDIAN

JERRY RINOLDY, ST, MT
NIP. 19720807 199903 1 004

SEKSI TATA KELOLA PERSANDIAN

-

MANGGALA INFORMATIKA AHLI MUDA

ZULINDAH
NIP. 19690911 198907 2 001

MANGGALA INFORMATIKA AHLI MUDA

MOUNTHE ZOMA, SE, M.Si
NIP. 19761225 201101 1 001

Unit Pelaksana Teknis
Dinas

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LKjIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dibuat dalam rangka mewujudkan administrasi kepegawaian yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Musi Banyuasin dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mempraktekkan prinsip – prinsip Good Governance, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan Publik Good and Service sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

Tujuan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah sebagai salah satu sarana yang merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 serta memperkuat peran dan kapasitas institusi parlemen dengan tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas.

SISTEMATIKA PENYAJIAN

LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Muba disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I : Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas Latar Belakang Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin, Struktur Organisasi yang terdiri dari Tugas Pokok dan Fungsi, Maksud Tujuan penyusunan LAKIP serta Sistematika Penulisan LKjIP.

BAB II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan secara ringkas tentang Renstra 2023-2026, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kerja Tahun 2024 dan Penetapan Kinerja Tahun 2024

BAB III : Akuntabilitas Kinerja menjelaskan Pengukuran capaian Kinerja Organisasi dan Akuntansi keuangan.

BAB IV : Penutup.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 REVIU RENCANA STRATEGIS 2023 – 2026

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin 2023 – 2026 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang harus dicapai selama lima (5) tahun sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin menjadi dasar pembuatan Rencana Kerja (Renja) Program dan Kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Banyuasin.

2.1.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026 berdasarkan kesesuaian antara faktor kunci keberhasilan dengan misi, maka dirumuskan tujuan :

1. "Optimalisasi Transparansi Informasi Publik dan Pengelolaan Komunikasi Publik dan Mendorong Percepatan Transformasi Digital"
2. "Optimalisasi Penyiapan Data Pembangunan "
3. "Meningkatkan Keamanan Informasi dan Komunikasi"

2.1.2 Sasaran

Sedangkan Sasaran menentukan keberhasilan tujuan yang diharapkan organisasi hendaknya mampu menciptakan inovasi dalam program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Sasaran utama yang hendak dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu :

- 1. "Meningkatnya penyediaan infrastruktur TIK berkualitas"
- 2. "Terwujudnya pelaksanaan, penyediaan, pengelolaan dan pelayanan informasi publik secara efektif"
- 3. "Meningkatnya Kualitas Data Pembangunan"
- 4. "Meningkatnya Keamanan Informasi".

Keterkaitan tujuan dan sasaran

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Musi Banyuasin 2023 – 2026

No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	'Optimalisasi Transparansi Informasi Publik dan Pengelolaan Komunikasi Publik dan Mendorong Percepatan Transformasi Digital	Meningkatnya penyediaan infrastruktur TIK berkualitas	Peningkatan Jumlah Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Peningkatan Indeks SPBE
			Peningkatan Jumlah Aplikasi/website perangkat daerah yang terkoneksi dengan pusat data kabupaten	Peningkatan Aplikasi/website perangkat daerah yang terkoneksi dengan pusat data kabupaten
		Terwujudnya pelaksanaan, penyediaan, pengelolaan dan pelayanan informasi publik secara efektif	Optimalisasi Transparansi Informasi Publik dan Pengelolaan Komunikasi Publik dan Mendorong Percepatan Transformasi Digital	Peningkatan Kepuasan Masyarakat terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi terkait Kebijakan dan Program Pemerintah Daerah
2	Optimalisasi Penyiapan Data Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Data Pembangunan	Meningkatkan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah melalui Data Statistik	Peningkatan Ketersediaan Data Statistik Sektoral
3	Meningkatkan Keamanan Informasi dan Komunikasi	Meningkatnya Keamanan Informasi	Melakukan Pengamanan untuk setiap Informasi dari Kegiatan yang ada di seluruh OPD di Kabupaten Musi Banyuasin Berbasis Persandian	Peningkatan Keamanan Informasi PD

2.1.3 Strategi dan Kebijakan

Adapun Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Muba adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Jumlah Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi
2. Peningkatan Jumlah Aplikasi/website perangkat daerah yang terkoneksi dengan pusat data kabupaten
3. Optimalisasi Transparansi Informasi Publik dan Pengelolaan Komunikasi Publik dan Mendorong Percepatan Transformasi Digital
4. Meningkatkan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah melalui Data Statistik
5. Melakukan Pengamanan untuk setiap Informasi dari Kegiatan yang ada di seluruh OPD di Kabupaten Musi Banyuasin Berbasis Persandian

Strategi dibuat untuk meningkatkan akselerasi pencapaian kinerja yang merujuk pada visi, misi, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan. Strategi tersebut dirumuskan dalam kebijakan yang menggambarkan bagaimana program, sasaran dan kegiatan organisasi dapat dicapai. Atas dasar tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan Indeks SPBE
2. Peningkatan Aplikasi/website perangkat daerah yang terkoneksi dengan pusat data kabupaten
3. Peningkatan Kepuasan Masyarakat terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi terkait Kebijakan dan Program Pemerintah Daerah
4. Peningkatan Ketersediaan Data Statistik Sektoral
5. Peningkatan Keamanan Informasi PD

2.1.4 Program dan Kegiatan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin pada Tahun Anggaran 2024, melaksanakan 5 (Lima) program dan 12 (dua belas) Kegiatan dan 34 (Tiga Puluh Empat Juta) Sub Kegiatan yaitu :

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Bertambah/ Berkurang	Setelah Perubahan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.427.989.522	1.493.481.852	10.277.135.838
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84.840.000	(14.130.000)	70.710.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	51.720.000	(9.810.000)	41.910.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	33.120.000	(4.320.000)	28.800.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.122.847.095	714.131.832	5.836.978.927
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.122.847.095	714.131.832	5.836.978.927
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	125.290.600	30.261.000	155.551.600
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	26.040.800	0	26.040.800
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	99.250.000	30.261.000	129.511.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	887.381.583	286.805.396	1.428.805.396
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.887.583	0	29.887.583
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	205.201.078	349.991.270	555.192.346
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	49.929.465	0	49.929.465
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	249.991.714	0	249.991.714
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	150.156.286	(26.040.800)	124.115.686
Penyediaan bahan/Material	49.950.000	(9.950.000)	40.000.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.400.000	(15.120.000)	35.280.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	356.996.000	(12.587.400)	344.408.600
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.533.921	0	100.533.921
Pengadaan Mebel	100.533.921	0	100.533.921
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.746.371.994	476.925.750	2.223.297.744

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	318.672.144	82.268.240	400.940.384
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.427.699.850	394.557.510	1.822.357.360
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	461.258.250	0	461.258.250
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	304.090.000	0	304.090.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	107.808.250	0	107.808.250
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49.360.000	0	49.360.000
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	7.980.460.249	1.292.483.539	9.791.837.552
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.980.460.249	1.292.483.539	9.791.837.552
Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	468.370.288	18.980.000	864.384.085
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	382.392.000,00	(5.124.000)	377.268.000
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	977.342.000	(293.202.600)	788.039.367
Pelayanan Informasi Publik	276.964.511	124.149.939	401.114.450
Layanan Hubungan Media	5.557.000.000	1.568.000.000	7.125.000.000
Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	257.206.300	(68.699.60)	188.506.700
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	61.185.150	(13.660.200)	47.524.950
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	(13.660.200)	(3.441.379.400)	7.415.736.718
Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	9.056.072.187	(3.224.802.400)	6.684.071.256
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	9.056.072.187	(3.224.802.400)	6.684.071.256
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	948.242.462	(216.577.000)	731.665.462
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	665.549.462	(136.449.100)	529.100.362
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	282.693.000	(80.127.900)	202.565.100
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	1.047.431.318	148.136.400	1.248.087.368
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	1.047.431.318	148.136.400	1.248.087.368

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	191.262.000	(51.858.600)	139.403.400
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	225.193.872	199.995.000	477.708.522
Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	630.975.446	0	630.975.446
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	1.157.058.800	(138.538.000)	1.798.503.243
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.157.058.800	(138.538.000)	1.798.503.243
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	405.548.500	(75.127.000)	330.421.500
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	659.440.900	(35.685.000)	627.016.200
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	92.069.400	(27.726.000)	841.065.543
JUMLAH	28.617.254.538	(645.815.609)	30.531.300.719

2.2 INDIKATOR KERJA UTAMA (IKU)

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin selaku Instansi Pemerintah Daerah perlu menetapkan peraturan tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2023-2026. Hal ini sejalan dengan penyempurnaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

Adapun Indikator Kinerja Utama telah dilegalformalkan melalui Peraturan Bupati Nomor 71 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 38 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022. Peraturan tersebut sekaligus diarahkan guna memberikan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam merumuskan acuan ukuran kinerja yang digunakan dalam rangka untuk menetapkan rencana kinerja tahunan,

menyampaikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja, dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis tahun 2023-2026.

Indikator Kinerja Utama untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin adalah SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik).

2.3 PENETAPAN KINERJA

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Penetapan kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment).

Penetapan Kinerja Tahun 2024 merupakan tahun kedua Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Muba, sehingga capaian kinerja tahun 2024 tersebut mencerminkan capaian awal renstra 2023 - 2026. Penetapan Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut :

SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target Capaian 2024
Meningkatnya penyediaan infrastruktur TIK berkualitas	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	%	3,23

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SATUAN	Target Capaian 2024
Program Aplikasi dan Informatika	1	'Indek SPBE	Indeks	3,23
	2	Persentase Aplikasi/website perangkat daerah yang terkoneksi dengan pusat data kabupaten	%	65
Program Informasi dan Komunikasi Publik	1	Persentase informasi pemerintah yang disampaikan kepada publik	%	100
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1	Persentase Data Statistik Sektoral	%	100
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	1	Persentase Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	%	100

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas/Badan/Kantor Kabupaten Musi Banyuasin yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin merupakan LKjIP tahun kedua dari pelaksanaan Rencana strategis (Renstra) Dinas/Badan/Kantor Kabupaten Musi Banyuasin periode 2023 – 2026 dan disusun berdasarkan kontribusi capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin. Capaian kinerja SKPD menggambarkan capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin dalam suatu bidang/sektor tertentu.

Proses penyusunan LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin masih banyak mengalami hambatan. Hambatan utama yang dijumpai dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2024 ini adalah kesulitan dalam pengumpulan data kinerja yang tersebar pada beberapa bidang di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin. Oleh karena itu di masa

yang akan datang, pengembangan sistem pengukuran kinerja akan menjadi fokus perhatian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin.

3.1 METODOLOGI PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

a. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi, dengan cara perhitungan sebagai berikut:

- 1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- 2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Kinerja Rencana}} \times 100\%$$

Selain membandingkan rencana dengan realisasi, pengukuran kinerja juga dilakukan dengan membandingkan realisasi tahun ini dengan realisasi tahun lalu, serta capaian sampai dengan tahun ini dengan target pada akhir periode dokumen Renstra.

b. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Akuntabilitas kinerja menggambarkan capaian kinerja sasaran atas Penetapan Kinerja (PK) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin. Penetapan Kinerja tersebut merupakan prasyarat untuk dicapai sebagai wujud komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi. Selanjutnya dilakukan pengukuran kinerja yang merupakan perbandingan antara target kinerja (performance plan) yang telah ditetapkan dengan realisasinya (performance result) untuk mengetahui celah kinerja (performance gap). Atas celah tersebut

kemudian dianalisis untuk mengetahui penyebab keberhasilan dan kegagalannya. Jika berhasil akan menjadi dasar dalam penetapan target tahun berikutnya, dan jika gagal akan menjadi bahan perbaikan untuk peningkatan kinerja dimasa datang (performance improvement).

Untuk lebih menggambarkan keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

☞	$X \geq 85 \%$	:	Sangat Berhasil
☞	$70 \% \leq X < 85 \%$	:	Berhasil
☞	$55 \% < X < 70 \%$	:	Cukup Berhasil
☞	$X \leq 55\%$	:	Tidak Berhasil

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator masukan, keluaran dan hasil

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026.

Pengukuran capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin dilakukan dengan metode perbandingan capaian kinerja dengan sasaran dilakukan yaitu dengan membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi yang menghasilkan suatu nilai capaian kinerja sasaran.

Secara keseluruhan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin telah berhasil mencapai sasaran strategis berikut indikator kerjanya pada tahun 2024 ini. Namun demikian, Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Musi Banyuasin telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar kinerja ini dapat terus dipertahankan sehingga bisa terus memberikan kontribusi yang besar dalam membangun daerah.

3.2 ANALISIS ATAS PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS TAHUN 2024

SASARAN INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

Tabel Capaian dan Realisasi IKU Tahun 2024

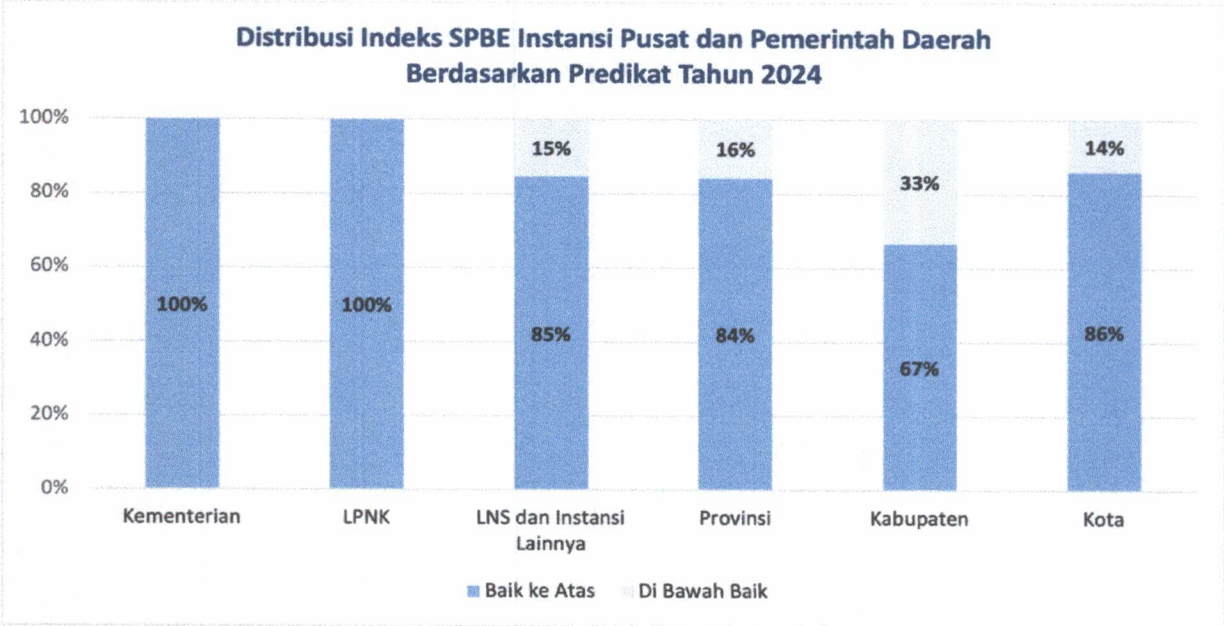
No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Mewujudkan Musi Banyuasin yang Bersih dan Melayani	1	Indeks SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik)	3,23	3,62	112

Keterangan :

EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2024

Indeks	Rata-Rata Nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	LNS dan Instansi Lainnya	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	3,12	4,03	3,82	3,37	3,42	2,45	3,39
Domain Kebijakan	3,36	4,28	4,01	3,61	3,61	2,51	3,64
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	3,36	4,28	4,01	3,61	3,61	3,23	3,64
Domain Tata Kelola	2,62	3,92	3,65	3,11	3,07	1,69	2,94
Perencanaan Strategis	2,41	3,74	3,68	3,01	2,84	1,54	2,60
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,75	4,06	3,75	3,11	3,26	1,76	3,10
Penyelenggaraan SPBE	2,80	4,00	3,40	3,32	3,14	1,85	3,31
Domain Manajemen	1,86	2,87	2,61	2,31	2,17	1,13	2,03
Penerapan Manajemen SPBE	1,91	2,96	2,68	2,38	2,19	1,16	2,09
Audit TIK	1,73	2,64	2,44	2,13	2,12	1,07	1,88
Domain Layanan SPBE	3,78	4,44	4,26	3,81	3,98	3,32	4,05
Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,77	4,35	4,20	3,90	3,95	3,40	3,99
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,80	4,58	4,36	3,67	4,04	3,21	4,15

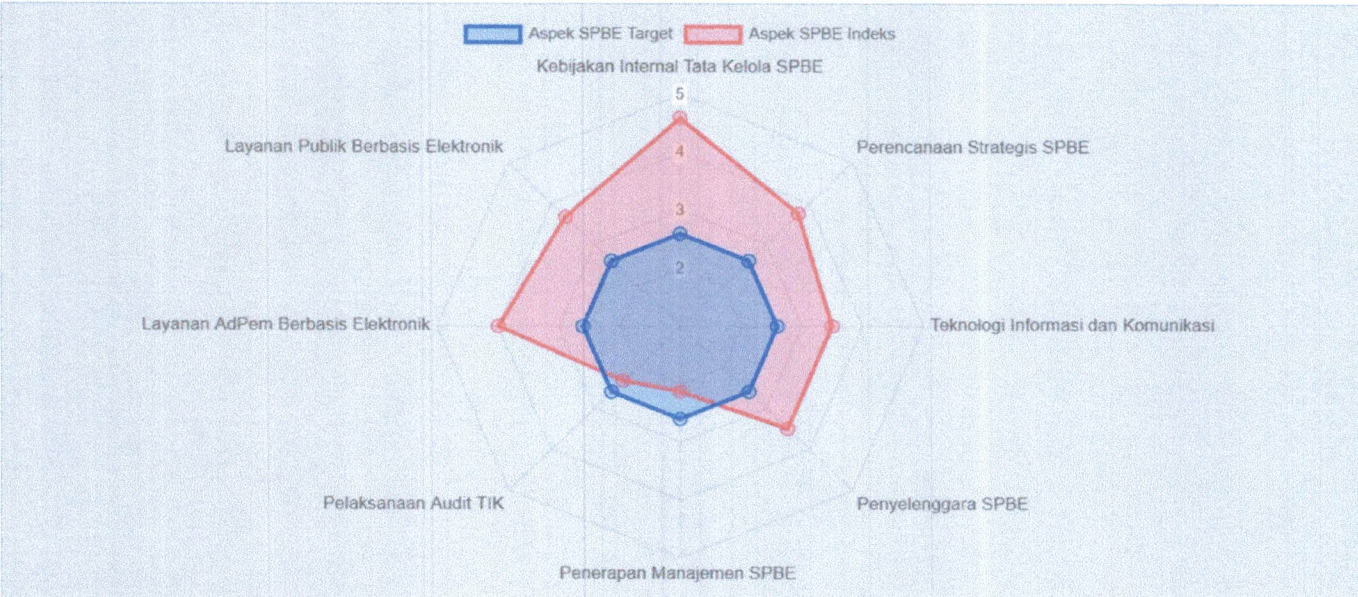
Domain dan Aspek Penilaian		Bobot	Predikat Indeks SPBE																		
Domain 1 - Kebijakan SPBE		13%	<table><tr><th>NO</th><th>NILAI INDEKS</th><th>PREDIKAT</th></tr><tr><td>1</td><td>4,2 – 5,0</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>2</td><td>3,5 – < 4,2</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>2,6 – < 3,5</td><td>Baik *)</td></tr><tr><td>4</td><td>1,8 – < 2,6</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>5</td><td>< 1,8</td><td>Kurang</td></tr></table> *) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)	NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT	1	4,2 – 5,0	Memuaskan	2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik	3	2,6 – < 3,5	Baik *)	4	1,8 – < 2,6	Cukup	5	< 1,8	Kurang
NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT																			
1	4,2 – 5,0	Memuaskan																			
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik																			
3	2,6 – < 3,5	Baik *)																			
4	1,8 – < 2,6	Cukup																			
5	< 1,8	Kurang																			
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE		13%																			
Domain 2 - Tata Kelola SPBE		25%																			
Aspek 2 - Perencanaan Strategis		10%																			
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi		10%																			
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE		5%																			
Domain 3 - Manajemen SPBE		16,5%																			
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE		12%																			
Aspek 6 - Audit TIK		4,5%																			
Domain 4 - Layanan SPBE		45,5%																			
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik		27,5%																			
Aspek 8 - Layanan Publik		18%																			



INDEKS SPBE – PEMERINTAH KAB. MUSI BANYUASIN

3,62
(Sangat Baik)

Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek



Nama Indeks			Nilai 2024
SPBE			3,62
Domain Kebijakan SPBE			4,60
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE			4,60
Domain Tata Kelola SPBE			3,60
Perencanaan Strategis SPBE			3,75
Teknologi Informasi dan Komunikasi			3,50
Penyelenggara SPBE			3,50
Domain Manajemen SPBE			2,18
Penerapan Manajemen SPBE			2,13
Audit TIK			2,33
Domain Layanan SPBE			3,87
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik			4,00
Layanan Publik Berbasis Elektronik			3,67

A. Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

Skor pemenuhan pada aspek ini adalah 4,6. Secara keseluruhan penerapan pada aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE yang sudah dipenuhi oleh Kab. Musi Banyuasin adalah dengan terpenuhinya semua indikator 1 sampai 10. Kebijakan terkait indikator 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, dan 10 telah direviu dan ditindak lanjuti sehingga mencapai kapabilitas level 5. Sedangkan indikator 3 dan 7 mencapai level 3.

- Kekuatan

Indikator 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, dan 10 telah mencapai level 5. Kebijakan internal terkait indikator ini telah direviu dan dilakukan tindak lanjut perbaikan. Pimpinan pemkab memiliki komitmen yang sangat baik dalam pengelolaan SPBE. Kebijakan internal Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tertuang dalam Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Kemudian diperbaiki dengan penetapan revisi kebijakan melalui Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 48 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Penetapan revisi kebijakan dilakukan pada 24 Agustus 2024 berdasarkan reviu yang dilakukan pada 31 Juli 2024. Indikator 3 dan 7 mencapai level 3. Kebijakan terkait manajemen data dan sistem penghubung layanan pemerintahan telah disusun secara lengkap. Untuk tahun selanjutnya perlu dilakukan reviu dan tindak lanjut perbaikan berkaitan dengan kebijakan ini. Catatan atau notulensi reviu perlu dituliskan secara detail, terkait poin-poin unsur yang direviu, akar permasalahan, dampak, dan rencana perbaikan yang disusun. Sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam program kerja/ kegiatan pengelolaan SPBE selanjutnya.

- Kelemahan

Tidak ada kelemahan untuk aspek ini. Semua indikator telah mencapai level 3 dan 5.

B. Perencanaan Strategis SPBE

Skor pemenuhan pada aspek ini adalah 3,75. Secara keseluruhan penerapan pada aspek Perencanaan Strategis SPBE telah terpenuhi dengan baik oleh Kab. Musi Banyuasin. Indikator 14 terkait Inovasi Proses Bisnis SPBE telah mencapai level 5. Indikator 11 terkait Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mencapai level 4, sedangkan indikator 12 dan 13 mencapai level 3.

- Kekuatan

Indikator 14 terkait Inovasi Proses Bisnis SPBE telah mencapai level 5. Telah dilakukan revidi terhadap Peta Proses Bisnis tahun 2023 pada 7 Juni 2024 yang bertujuan menghasilkan rekomendasi untuk proses bisnis to-be. Perbaikan proses bisnis as-is menjadi to-be telah tertuang pada SIA -SPBE. Inovasi Proses Bisnis pada proses penyediaan infrastruktur TIK yang semula diterapkan melalui mekanisme non elektronik/non aplikasi, kemudian diubah dengan menggunakan sistem elektronik/aplikasi. Telah dilakukan revidi terkait kinerja proses dengan menggunakan proses bisnis yang baru (aplikasi SIMOHON BANGET). Indikator 11 terkait Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mencapai level 4. Arsitektur SPBE

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tertuang dalam Keputusan Bupati Musi Banyuasin

Nomor : 606 /KPTS-DINKOMINFO/2023. Selanjutnya dilakukan rapat untuk tindak lanjut pada 8,15,22 dan 30 Mei 2024, yang menghasilkan rekomendasi-rekomendasi untuk arsitektur to-be. Arsitektur SPBE as-is juga telah termuat di Sistem Informasi Arsitektur SPBE Nasional. Namun demikian, belum dihasilkan dokumen arsitektur to-be yang disahkan oleh kepala daerah. Indikator 12 dan 13 mencapai level 3. Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Musi

Banyuasin sebelumnya tertuang dalam telah di tetapkan pada KEPUTUSAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR : 617/KPTS-BAPPEDA/2023. Namun, belum dilakukan revidi terhadap peta rencana SPBE.

- Kelemahan

Tidak ada kelemahan untuk aspek ini. Semua indikator telah mencapai level 3, 4 dan 5.

c. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Skor pemenuhan pada aspek ini adalah 3,5. Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi telah terpenuhi dengan baik. Indikator 16 tentang Layanan Pusat Data telah mencapai level 5. Sedangkan indikator 15, 17, dan 18 mencapai level 3.

- Kekuatan

Indikator 16 tentang Layanan Pusat Data telah mencapai level 5. Layanan pusat data telah dimanfaatkan oleh semua OPD. Telah dilakukan revidi dan upaya perbaikan berkaitan dengan tata kelola layanan pusat data ini. Indikator 15, 17, dan 18 mencapai level 3. Namun demikian,

Indikator aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi terkait pengembangan aplikasi, layanan jaringan intra, dan sistem penghubung layanan belum direviu dengan benar. Proses reviu tidak dilakukan secara detil terhadap setiap indikator TIK, sehingga tidak terlihat bagaimana kesesuaiannya dengan upaya perbaikan yang dilakukan.

- Kelemahan

Tidak ada kelemahan untuk aspek ini. Semua indikator telah mencapai level 3 dan 5.

D. Penyelenggara SPBE

Skor pemenuhan pada aspek ini adalah 3,5. Aspek Penyelenggara SPBE telah terpenuhi dengan baik. Indikator 19 tentang Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE telah mencapai level 4. Tim Koordinasi SPBE telah dibentuk dan telah dilakukan reviu terhadap kinerjanya. Sedangkan indikator 20 tentang Kolaborasi Penerapan SPBE mencapai level 3. Telah terdapat Tim kolaborasi SPBE, yaitu Forum Kolaborasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Musi Banyuasin.

- Kekuatan

Indikator 19 tentang Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE telah mencapai level 4. Pemkab telah membentuk Tim Koordinasi SPBE dan telah melakukan reviu terhadap kinerjanya. Sedangkan indikator 20 tentang Kolaborasi Penerapan SPBE mencapai level 3. Pemkab telah membentuk Forum Kolaborasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang melakukan pertemuan secara rutin setiap tahun. Namun belum dilakukan reviu terhadap efektifitasnya.

- Kelemahan

Tidak ada kelemahan untuk aspek ini. Semua indikator telah mencapai level 3 dan 4.

E. Penerapan Manajemen SPBE

Skor pemenuhan pada aspek ini adalah 2,125. Aspek Penerapan Manajemen SPBE masih belum terpenuhi. Semua aspek manajemen SPBE telah tertuang di peta rencana, dan diatur secara formal melalui SOP. Namun demikian, tidak terdapat bukti pelaksanaannya. Hanya indikator 22 terkait keamanan informasi saja yang mencapai level 3, indikator yang lainnya masih mencapai level 2.

- Kekuatan

Semua aspek manajemen SPBE telah tertuang di peta rencana, dan diatur secara formal melalui SOP. indikator 22 terkait keamanan informasi mencapai

level 3. Manajemen keamanan informasi telah diterapkan dengan baik, dan telah diperoleh sertifikasi ISO27001 untuk sebagian layanan TI-nya.

- Kelemahan

Penerapan manajemen SPBE terkait indikator 21, 23, 24, 25, 26, 27, dan 28 belum dilakukan di lingkungan Pemkab. Bukti dukung terkait penerapan manajemen SPBE tidak lengkap.

F. Pelaksanaan Audit TIK

Skor pemenuhan pada aspek ini adalah 2,33. Aspek Pelaksanaan Audit TIK masih belum terpenuhi. Indikator 31 terkait Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE telah mencapai level 3. Audit keamanan informasi telah dilakukan oleh pihak eksternal yaitu TUV-DUV untuk memenuhi ISO 27001:2022. Namun, hasilnya belum terinput di sistem audit. Sedangkan indikator 29 dan 30 tentang Pelaksanaan Audit Infrastruktur dan aplikasi SPBE masih mencapai level 2. Pemkab telah membentuk tim pemeriksa keamanan aplikasi/website dan infrastruktur SPBE untuk melaksanakan audit TIK. Namun, pelaksanaan audit infrastruktur dan aplikasi belum sesuai dengan ketentuan teknis (tools/kertas kerja) yang disediakan oleh BRIN dan belum terinput di sistem audit.

- Kekuatan

Indikator 31 terkait Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE telah mencapai level 3. Audit keamanan informasi telah dilakukan oleh pihak eksternal yaitu TUV-DUV (untuk memenuhi ISO 27001:2022, meskipun hanya untuk beberapa layanan TIK yaitu pembuatan email, electronic signatures, dan backup data regional.

- Kelemahan

Indikator 29 dan 30 tentang Pelaksanaan Audit Infrastruktur dan aplikasi SPBE masih mencapai level 2. Pelaksanaan audit aplikasi dan infrastruktur belum sesuai dengan ketentuan teknis (tools/kertas kerja) yang disediakan oleh BRIN dan hasilnya tidak terinput di sistem audit.

G. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Skor pemenuhan pada aspek ini adalah 4. Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik telah terpenuhi dengan baik. Pemkab banyak memanfaatkan aplikasi umum dan aplikasi berbagi pakai yang disediakan oleh pemerintah pusat. Indikator 36 dan 41 tentang Layanan Kepegawaian dan Kinerja Pegawai telah mencapai level 5. Indikator Indikator 32, 33, 34, 35, 37, dan 38 telah mencapai level 4. Indikator 39 dan 40 tentang Layanan Pengawasan Internal Pemerintah dan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi mencapai level 3.

- **Kekuatan**

Pemkab banyak memanfaatkan aplikasi umum dan aplikasi berbagi pakai yang disediakan oleh pemerintah pusat. Indikator 36 dan 41 tentang Layanan Kepegawaian dan Kinerja Pegawai telah mencapai level 5. Pemkab juga mengembangkan aplikasi kepegawaian yang terintegrasi dengan MyASN dan E-Office nya. Aplikasi ini telah direviu dan diperbaiki sesuai hasil reviu. Indikator 32, 33, 34, 35, 37, dan 38 telah mencapai level 4. Pemkab memanfaatkan aplikasi umum dan berbagi pakai seperti SIPD, SPSE, SRIKANDI, dan SIMDA. Indikator 39 dan 40 tentang Layanan Pengawasan Internal Pemerintah dan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi mencapai level 3. Pemkab menggunakan Whistblowing System (WBS) melalui website pada link <https://www.itda.mubakab.go.id/>. Sedangkan untuk Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi berbasis Elektronik menggunakan aplikasi berbagi pakai E-Sakip. Belum dilakukan reviu terhadap layanan administrasi pemerintahan yang telah didukung oleh aplikasi, untuk meningkatkan kualitas layanannya.

- **Kelemahan**

Tidak ada kelemahan untuk aspek ini. Semua indikator telah mencapai level 3, 4, dan 5.

H. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Skor pemenuhan pada aspek ini adalah 3,667. Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik telah terpenuhi dengan baik. Indikator 42, 43, 45, 46, dan 47 telah mencapai level 4. Aplikasi publik sektoral yang digunakan yaitu OSS, aplikasi RSUD Sekayu dan aplikasi layanan kependudukan. Hanya indikator 44 tentang Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang masih di level 2.

- **Kekuatan**

Indikator 42, 43, 45, 46, dan 47 telah mencapai level 4. Pemkab telah mengembangkan aplikasi RSUD Sekayu dan aplikasi layanan kependudukan yang memiliki kapabilitas level 4. Pemkab juga telah memanfaatkan aplikasi berbagi pakai OSS. Namun demikian, penggunaan aplikasi untuk Layanan Publik Berbasis Elektronik perlu untuk direviu, sehingga dapat susun langkah perbaikan untuk peningkatan kualitas layanan publik sektoral.

- **Kelemahan**

Indikator 44 tentang Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) masih di level 2. Layanan JDIH Berbasis Elektronik sudah diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menggunakan aplikasi JDIH pada link jdih.mubakab.com. Berdasarkan manual book dan screenshot aplikasi,

dapat dilihat bahwa aplikasi memiliki kapabilitas interaksi, melalui fitur pencarian, upload, dan download. Tidak nampak fitur untuk validasi/verifikasi maupun analisis data. Aplikasi menampilkan data statistik, tetapi tidak memiliki fitur yang dapat digunakan secara langsung oleh pengguna untuk melakukan analitika data.

REKOMENDASI

Secara prinsip, dengan adanya implementasi kebijakan internal, tata Kelola, dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE Pemkab Musi Banyuasin. Pimpinan pemkab memiliki komitmen yang sangat baik dalam pengelolaan SPBE. Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan, sudah dapat menggambarkan predikat sangat baik dalam penerapan SPBE, dengan nilai indeks total 3,62, sebagaimana terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan.

Keunggulan:

Pembkab Musi Banyuasin memiliki keunggulan pada aspek pengelolaan SPBE (rata-rata skor di atas 3,5) sebagai berikut. Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE =4,6 Perencanaan Strategis SPBE=3,75 Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik = 4 dan

Layanan Publik Berbasis Elektronik=3,667. Dengan 2 aspek yang masih dalam pencapaian standar yaitu Teknologi Informasi dan Komunikasi=3,5 dan Penyelenggara SPBE=3,5.

Sebagian besar kebijakan internal SPBE telah direviu dan dilakukan tindak lanjut perbaikan. Perencanaan Strategis SPBE berupa arsitektur SPBE dan peta proses as-is dan to-be telah termuat di SIA Nasional. Layanan pusat data, layanan jaringan intra, dan sistem penghubung layanan telah dimanfaatkan oleh semua OPD. Pemkab telah membentuk Tim Koordinasi SPBE dan telah melakukan reviu terhadap kinerjanya. Pemkab telah membentuk Forum Kolaborasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang melakukan pertemuan secara rutin setiap tahun. Manajemen keamanan informasi telah diterapkan dengan baik. Audit keamanan informasi telah dilakukan oleh pihak eksternal yaitu TUV-DUV (untuk memenuhi ISO 27001:2022, meskipun hanya untuk beberapa layanan TIK yaitu pembuatan email, electronic signatures, dan backup data regional. Pemkab banyak memanfaatkan aplikasi umum dan aplikasi berbagi pakai yang disediakan oleh pemerintah pusat. Pemkab telah mengembangkan aplikasi RSUD Sekayu dan aplikasi layanan kependudukan yang sangat baik.

Kelemahan:

Pemkab Musi Banyuasin memiliki kelemahan pada aspek pengelolaan SPBE (rata-rata skor di bawah 2,6) yaitu Penerapan Manajemen SPBE=2,125 dan Pelaksanaan Audit TIK=2,333.

Proses revidi yang telah dilakukan belum disertai dengan catatan/notulensi yang detail. Penerapan manajemen SPBE belum dilakukan dengan baik. Hanya manajemen keamanan informasi saja yang telah dilakukan dengan baik. Pelaksanaan audit aplikasi dan infrastruktur belum sesuai dengan ketentuan teknis (tools/kertas kerja) yang disediakan oleh BRIN dan hasilnya tidak terinput di sistem audit. Layanan JDIH Berbasis Elektronik yang menggunakan aplikasi JDIH pada link jdih.mubakab.com perlu ditambahkan fitur validasi/verifikasi/analisis data.

Rekomendasi:

1. Catatan atau notulensi proses revidi perlu ditulis secara detail, terkait komponen SPBE yang direvidi, isu permasalahan, dampak, dan rencana penyelesaian/perbaikan. Proses tindak lanjut harus didasarkan pada rencana perbaikan yang disusun saat proses revidi.
2. Pemkab perlu melakukan penerapan manajemen SPBE sesuai dengan kebijakan dan aturan yang telah disusun. Bukti pelaksanaan manajemen harus didokumentasikan dengan baik.
3. Pelaksanaan audit TIK perlu berkoordinasi dengan BRIN dan BSSN sehingga hasilnya dapat diinputkan di sistem audit.
4. Aplikasi JDIH perlu dikembangkan dengan menambahkan fitur validasi/verifikasi/analisis data.

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator		
Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga)		
No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2024
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi	5
2	Pusat/Pemerintah Daerah Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi	5
3	Pusat/Pemerintah Daerah Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	3
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	5
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	5
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi	5
7	Pusat/Pemerintah Daerah Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung	3
8	Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	5
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	5
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi	5
11	Pusat/Pemerintah Daerah Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
13	Daerah Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE	3
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	5
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	3
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	5
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah	3
18	Daerah Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	3
19	Pusat/Pemerintah Daerah Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Instansi	4
20	Pusat/Pemerintah Daerah Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	3

21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	2
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	3
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	2
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	2
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	2
26	SPBE Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	2
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	2
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	2
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	2
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	2
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	3
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	5
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	4
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	4
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	3
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	3
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	5
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	4
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi	2
45	Hukum (JDIH) Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	4
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	4
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	4

Secara rinci uraian pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Informatika Kabupaten Musi Banyuasin, berdasarkan Misi adalah sebagai berikut:

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SATUAN	Target	Realisasi 2024	Capaian 2024
Program Aplikasi dan Informatika	1	Indeks SPBE	Indeks	3,23	3,62	112
	2	Persentase Aplikasi/website perangkat daerah yang terkoneksi dengan pusat data kabupaten	%	65	41	63
Program Informasi dan Komunikasi Publik	1	Persentase informasi pemerintah yang disampaikan kepada publik	%	100	100	100
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1	Persentase Data Statistik Sektoral	%	100	100	100
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	1	Persentase Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	%	100	100	100

1. Persentase Aplikasi/Website Perangkat Daerah yang terkoneksi dengan pusat data kabupaten

Persentase Aplikasi/Website Perangkat Daerah yang terkoneksi dengan pusat data kabupaten mempunyai Capaian Persentase sebesar 41% dengan target 65% dan terealisasi 63%, dari 118 Aplikasi/website di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Terdapat 49 Aplikasi/Website yang hoasting pada Server Dinkominfo pada tahun 2024.

Website dan Aplikasi Perangkat Daerah

HOSTING DINKOMINFO

HOSTING DILUAR

No	Nama Sistem/Aplikasi	Alamat Domain	Perangkat Daerah
1.	Sistem Informasi Dinkominfo Muba	dinkominfo.mubakab.go.id	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.	E-Sekretariat Dinkominfo Muba	sekretariat.dinkominfo.mubakab.go.id	
3.	Hotspot User Management System	wifi.mubakab.go.id	
4.	Muba Tanggap Covid 19	covid19.mubakab.go.id	
5.	Muba Fasttrack	fasttrack.mubakab.go.id	

No	Nama Sistem/Aplikasi	Alamat Domain	Perangkat Daerah
6.	Layanan Muba Siaga 112	siaga112.mubakab.go.id	
7.	Absensi Online	absen.dinkominfo.mubakab.go.id	
8.	Portal Layanan Publik	layanan.dinkominfo.mubakab.go.id	
9.	Portal Satu Data Muba	satudata.mubakab.go.id	
10.	E-Office Desa	eofficedesa.mubakab.go.id	
11.	E-Office ASN	eoffice.mubakab.go.id	
12.	Sistem Informasi D-PUPR	dpupr.mubakab.go.id	Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang
13.	Sistem Informasi Penataan Ruang Kab. Muba	sitarum.mubakab.go.id	
14.	Sistem Informasi Dinas Lingkungan Hidup	dlh.mubakab.go.id	Dinas Lingkungan Hidup
15.	Sistem Informasi Dinas Lingkungan Hidup	sil.dlh.mubakab.go.id	
16.	Sistem Informasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	perkim.mubakab.go.id	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
17.	Sistem Informasi Dinas Perdagangan & Perindustrian Kab. Muba	dagperin.mubakab.go.id	Dinas Perdagangan & Perindustrian
18.	Katalog lokal	blanje.dagperin.mubakab.go.id	
19.	Sistem Informasi Perdagangan	sidag.dagperin.mubakab.go.id	
20.	Sistem Informasi Pelayanan Tera Ulang	yantera.dagperin.mubakab.go.id	
21.	Sistem Informasi Dinas Perkebunan Kab. Muba	disbun.mubakab.go.id	Dinas Perkebunan
22.	E-Statistik Disbun	estatistik.disbun.mubakab.go.id	
23.	Siapbunn	siappbun.disbun.mubakab.go.id	
24.	Sistem Informasi Dinas Perikanan Kab. Muba	disperik.mubakab.go.id	Dinas Perikanan
25.	Ikan Musi	ikanmusi.mubakab.go.id	
26.	Sistem Informasi	dkp.mubakab.go.id	Dinas Ketahanan Pangan
27.	Sistem Informasi	Dinsos.mubakab.go.id	Dinas Sosial
28.	Sistem Informasi	dppkb.mubakab.go.id	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
29.	Sistem Informasi	tphp.mubakab.go.id	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan
30.	Sistem Informasi BPBD	bpbd.mubakab.go.id	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
31.	Sistem Informasi Kesbangpol	kesbangpol.mubakab.go.id	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
32.	Sistem Informasi Bag. Hukum	jdihi.mubakab.go.id	Bagian Hukum
33.	e-Library JDIH	elib.jdihi.mubakab.go.id	

No	Nama Sistem/Aplikasi	Alamat Domain	Perangkat Daerah
34.	Sistem Informasi	esakip.mubakab.go.id	Bagian Organisasi
35.	E-Sakip	ekip.mubakab.go.id	
36.	Sistem Informasi Kecamatan	kecamatanbabatsupat.mubakab.go.id	Kecamatan Babat Supat
37.		Kecamatanbayunglencir.mubakab.go.id	Kecamatan Bayung Lencir
38.		kecamatanlais.mubakab.go.id	Kecamatan Lais
39.		kecamatanlalan.mubakab.go.id	Kecamatan Lalan
40.		kecamatansekayu.mubakab.go.id	Kecamatan Sekayu
41.		kecamatansungaikeruh.mubakab.go.id	Kecamatan Sungai Keruh
42.		kecamatantungkaljaya.mubakab.go.id	Kecamatan Tungkal Jaya
43.		kecamatankeluang.mubakab.go.id	Kecamatan Keluang
44.		kecamatansangadesa.mubakab.go.id	Kecamatan Sanga Desa
45.		kecamatansungaililin.mubakab.go.id	Kecamatan Sungai Lilin
46.		kecamatanbatangharileko.mubakab.go.id	Kecamatan Batang Hari Leko
47.		kecamatanplakattinggi.mubakab.go.id	Kecamatan Plakat Tinggi
48.		kecamatanbabattoman.mubakab.go.id	Kecamatan Babat Toman
49.		kecamatanlawangwetan.mubakab.go.id	Kecamatan Lawang Wetan
50.		kecamatanjirakjaya.mubakab.go.id	Kecamatan Jirak Jaya
51.	Sistem Informasi Inspektorat Kab. Muba	itda.mubakab.go.id	Inspektorat
52.	Sistem Informasi RSUD Sungai Lilin	rsudsungaililin.mubakab.go.id	RSUD Sungai Lilin
53.	Sistem Informasi Satpol PP Kab. Muba	satpolpp.mubakab.go.id	Satpol PP
54.	Sistem Informasi Dinkes Muba	dinkes.mubakab.go.id	Dinas Kesehatan
55.	Seluang	simpus.dinkes.mubakab.go.id	
56.	Sistem Informasi Dispora	jelajahmuba.mubakab.go.id	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
57.	Sistem Informasi Dispora	sipora.dispopar.mubakab.go.id	
58.	Sistem Informasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	disdikbud.mubakab.go.id	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
59.	Sistem Informasi Disdukcapil Kab. Muba	disdukcapil.mubakab.go.id	Dinas Penduduk & Pencatatan Sipil
60.	Aplikasi Perpustakaan Digital (iMuba)	dpk.mubakab.go.id/imuba	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
61.	Aplikasi Otomatis Perpustakaan (INLISLITE)	dpk-inlislite.mubakab.go.id	
62.	Aplikasi Dokumen Online	dpk.mubakab.go.id/dok-online	

No	Nama Sistem/Aplikasi	Alamat Domain	Perangkat Daerah
63.	Aplikasi Sistem Informasi Arsip Statis dan In Aktif (SIP NIAA)	dpk.mubakab.go.id/sip-nia	
64.	Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD)	dpk.mubakab.go.id/sikd	
65.	Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Nasional – Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (SIKN – JIKN)	dpk-arsip.mubakab.go.id	
66.	Aplikasi Penyimpanan File (Drive)	dpk.mubakab.go.id:18/drive	
67.	Aplikasi Help Desk	dpk.mubakab.go.id/helpdesk	
68.	Sistem Informasi DPMPTSP	dpmptsp.mubakab.go.id	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu
69.	Perizinan Online	dpmptsp.mubakab.go.id/online/web/login	
70.	Monitoring Perizinan	dpmptsp.mubakab.go.id/online/web/status_proses	
71.	Peta Perizinan	dpmptsp.mubakab.go.id/gis/map	
72.	Regulasi Perizinan	dpmptsp.mubakab.go.id/online/web/regulasi	
73.	Persyaratan Perizinan	dpmptsp.mubakab.go.id/online/web/daftar_perizinan	
74.	Pengaduan	pengaduan.dpmptsp.mubakab.go.id	
75.	Survei Kepuasan Masyarakat	skm.dpmptsp.mubakab.go.id	
76.	Sistem Antrian	antrian.dpmptsp.mubakab.go.id	
77.	Aplikasi Hitung PBG	hitungpbggyuk.dpmptsp.mubakab.go.id	
78.	Aplikasi Senamo	senamo.dpmptsp.mubakab.go.id	
79.	SMS Gateway	sms.dpmptsp.mubakab.go.id	
80.	Kepoin muba	kepoimuba.dpmptsp.mubakab.go.id	
81.	Sistem Informasi Dinas Perkebunan Kab. Muba	dishub.mubakab.go.id	Dinas Perhubungan
82.	Sistem Informasi Disnakertrans	disnakertrans.mubakab.go.id	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
83.	Sistem Informasi PMD	dpmd.mubakab.go.id	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
84.	Pengolaan Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	sipd.mubakab.go.id	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
85.	Pengelolaan Sistem Perencanaan Pembangunan (e-Planning)	eplan.mubakab.go.id	
86.	Sistem Informasi BAPPEDA	bappeda.mubakab.go.id	
87.	Geoportal	geoportal.mubakab.go.id	
88.	Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (SIPP)	sipp.mubakab.go.id	
89.	Sistem Informasi Infrastruktur Musi Banyuasin	siimuba.mubakab.go.id	Badan Pengelola
90.	Aplikasi SIMDA	172.16.51.199	

No	Nama Sistem/Aplikasi	Alamat Domain	Perangkat Daerah
91.	Aplikasi Sistem Rekonsiliasi Aset (SEREKAT)	serekat.mubakab.go.id	Keuangan dan Aset Daerah
92.	Sistem Informasi BPKAD	bpkad.mubakab.go.id	
93.	Sistem Informasi BKPSDM	bkpsdm.mubakab.go.id	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
94.	Sistem Informasi Keunggulan Pelayan Kepegawaian Kab Musi	sikupek.mubakab.go.id	
95.	E Kinerja	ekinerja.mubakab.go.id	
96.	Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah (Simpatda)	simpatda.mubakab.go.id	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
97.	PBB Cek Online	bpprd.mubakab.go.id /tagihanpbb	
98.	Monitoring Pajak	bpprd.mubakab.go.id/monitoring	
99.	E-BPHTB	ebphtb.mubakab.go.id	
100.	ESPTT	esppt.mubakab.go.id	
101.	E-SPTPD	esptpd.mubakab.go.id	
102.	Sistem Informasi Bag. Kerjasama	kerjasama.setda.mubakab.go.id	Bagian Kerja Sama
103.	Sistem Informasi Bag. BPBJ	bpbj.setda.mubakab.go.id	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
104.	SIKD BPBJ	sikd.bpbj.mubakab.go.id	
105.	Layanan Pengadaan Secara Elektronik	lpse.mubakab.go.id	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
106.	Sistem Informasi RSUD Sekayu	rsudsekayu.mubakab.go.id	RSUD Sekayu
107.	Portal IT RSUD Sekayu	it.rsudsekayu.mubakab.go.id	
108.	Aplikasi Kehadiran RSUD Sekayu	absen.rsudsekayu.mubakab.go.id	
109.	Aplikasi Kesehatan RSUD Sekayu	apkes.rsudsekayu.mubakab.go.id	
110.	Aplikasi Arteri RSUD Sekayu	arteri.rsudsekayu.mubakab.go.id	
111.	Aplikasi e-letter RSUD Sekayu	e-letter.rsudsekayu.mubakab.go.id	
112.	Aplikasi e-perja RSUD Sekayu	e-perja.rsudsekayu.mubakab.go.id	
113.	Aplikasi MCU RSUD Sekayu	mcu.rsudsekayu.mubakab.go.id	
114.	Aplikasi Perpustakaan RSUD Sekayu	perpus.rsudsekayu.mubakab.go.id	
115.	Aplikasi SIMPEG RSUD Sekayu	simpeg.rsudsekayu.mubakab.go.id	
116.	Aplikasi Sipcuan RSUD Sekayu	sipcuan.rsudsekayu.mubakab.go.id	
117.	Aplikasi SPM RSUD Sekayu	spm.rsudsekayu.mubakab.go.id	
118.	Sekretariat DPRD	dprd-mubakab.go.id	Sekretariat DPRD
BELUM MEMILIKI APLIKASI/ WEBSITE			
1.	-	-	Dinas Koperasi

No	Nama Sistem/Aplikasi	Alamat Domain	Perangkat Daerah
2.	-	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

JUMLAH SELURUH APLIKASI/ WEBSITE : 118
HOSTING DI DINKOMINFO : 49
HOSTING DILUAR : 69

2. Persentase Informasi Pemerintah Daerah

Persentase Informasi Pemerintah Daerah mempunyai Capaian Persentase sebesar 100% dengan target 100% dan terealisasi 100%, terdapat 848 data yang terdokumentasi dari 848 jumlah Data yang Terpublikasi.

3. Persentase Data Statistik Sektoral

Persentase Data Statistik Sektoral mempunyai Capaian Persentase sebesar 100% dengan target 100% dan terealisasi 100%, terdapat 375 jumlah data sektoral tersedia dari 375 jumlah data sektoral yang harus disediakan.

4. Persentase Keamanan Informasi Pemerintah Daerah

Persentase Keamanan Informasi Pemerintah Daerah mempunyai capaian Persentase sebesar 100% dengan target 100% dan terealisasi 100%, terdapat 41 jumlah Aplikasi khusus sudah diaudit keamanan informasi dari 41 jumlah Aplikasi khusus tertentu.

Daftar Aplikasi Pemerintah Musi Banyuasin Aktif

NO.	Domain	IP	Status Aplikasi/Website
1	sitarum.mubakab.go.id	103.164.174.12	200
2	bappeda.mubakab.go.id	117.74.114.124	Error
3	bkpsdm.mubakab.go.id	103.164.174.10	500
4	bpbd.mubakab.go.id	103.164.174.10	200
5	bpkad.mubakab.go.id	153.92.9.49	200

6	cc.mubakab.go.id		Error
7	sipora.dispopar.mubakab.go.id	103.25.209.194	200
8	dinkes.mubakab.go.id	103.164.174.50	Error
9	dinkominfo.mubakab.go.id	103.164.174.10	200
10	dinsos.mubakab.go.id	103.164.174.10	200
11	disdukcapil.mubakab.go.id	103.25.209.194	200
12	disnakertrans.mubakab.go.id	103.164.174.10	200
13	sipd.mubakab.go.id	117.74.114.123	Error
14	simpatda.mubakab.go.id	103.164.175.67	200
15	bpbj.setda.mubakab.go.id	103.164.174.88	200
16	eoffice.mubakab.go.id	103.8.238.200	200
17	geoportal.mubakab.go.id	103.164.174.11	200
18	ikanmusi.mubakab.go.id	103.102.146.171	200
19	kecamatanbabatsupat.mubakab.go.id	103.164.174.10	200
20	kecamatanbabattoman.mubakab.go.id	103.164.174.10	200
21	kecamatanbatangharileko.mubakab.go.id	103.164.174.10	200
22	kecamatanbayunglencir.mubakab.go.id	103.164.174.10	200
23	kecamatankeluang.mubakab.go.id	103.164.174.10	200
24	kecamatanlais.mubakab.go.id	103.164.174.10	200
25	kecamatanlawangwetan.mubakab.go.id	103.164.174.10	200
26	kecamatanplakattinggi.mubakab.go.id	103.164.174.10	200
27	kecamatanungaikeruh.mubakab.go.id	103.164.174.10	200
28	kerjasama.setda.mubakab.go.id		200
29	kecamatantungkaljaya.mubakab.go.id	172.67.141.237	200
30	kesbangpol.mubakab.go.id	103.164.174.10	200

31	mubakab.go.id	103.164.174.10	200
32	perkim.mubakab.go.id	103.164.174.10	200
33	rsudsekayu.mubakab.go.id	104.21.79.43	200
34	rsudsungaililin.mubakab.go.id	103.164.174.10	200
35	dlh.mubakab.go.id	103.164.174.10	200
36	itda.mubakab.go.id	103.164.174.10	404
37	kecamatansekayu.mubakab.go.id	103.164.174.10	200
38	siaga112.mubakab.go.id	104.21.79.43	200
39	sipcuana.rsudsekayu.mubakab.go.id	103.160.57.50	200
40	sms.dpmptsp.mubakab.go.id	103.164.174.10	500
41	www.sms.dpmptsp.mubakab.go.id	103.164.174.10	500

Kesimpulan :

Telah dilakukan uji Vurnerability Assesment dari Januari-Desember 2023 sampai 2024 terhadap 41 Aplikasi yang digunakan Pada Pemerintah Daerah Musi Banyuasin. Setelah dilakukan pengujian ditemukan beberapa kerentanan pada Aplikasi dan terdapat 34 Aplikasi yang masih aktif dan 7 Aplikasi yang tidak aktif lagi atau Vakum. Diharapkan dengan pelaksanaan pengujian Vurnerability Assesment ini akan menjadi bahan Rekomendasi perbaikan terhadap Aplikasi untuk menutup celah keamanan dan meningkatkan keamanan aplikasi dari kerentanan serangan siber.

Perbandingan dengan Tahun sebelumnya

1. Mewujudkan Musi Banyuasin yang Bersih dan Melayani									
No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal RPJMD 2016	Tahun 2023			Tahun 2024			Target Akhir RPJMD 2026
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1.	Indeks SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik)	-	3,1	2,85	91,9%	3,23	3,62	112	3,50

Nama Indikator		Sat	Tahun 2023		Capaian Kinerja thn 2023 (%)	Nama Indikator		Sat	Tahun 2024		Capaian Kinerja thn 2024 (%)
			Target	Realisasi					Target	Realisasi	
1	Persentase Aplikasi/website perangkat daerah yang terkoneksi dengan pusat data kabupaten	%	55	1	67%	1	Persentase Aplikasi/website perangkat daerah yang terkoneksi dengan pusat data kabupaten	%	65	41	63
2	Persentase informasi pemerintah yang disampaikan kepada publik	%	100	2	75,83%	2	Persentase informasi pemerintah yang disampaikan kepada publik	%	100	100	100
3	Persentase Data Statistik Sektoral	%	100	3	100%	3	Persentase Data Statistik Sektoral	%	100	100	94
4	Persentase Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	%	100	4	100%	4	Persentase Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	%	100	100	100

Indikator Kinerja pada tahun 2024 mengacu pada indikator kinerja pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Muba 2023 – 2026.

3.3 Membandingkan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab yang dituangkan ke dalam 5 (lima) indikator kinerja akan dilaksanakan berdasarkan RPD Kab. Muba 2023 - 2026, adapun tingkat keberhasilan dalam pencapaian sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2026 dengan Target

SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Realisasi Akumulasi s.d tahun 2024	Rencana sesuai dengan RPJMD tahun 2026	% Capaian
Meningkatnya penyediaan infrastruktur TIK berkualitas	Indeks SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik)	Indeks SPBE	3,62	3,50	103

SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Realisasi Akumulasi s.d tahun 2024	Rencana sesuai dengan RPJMD tahun 2026	% Capaian
Meningkatnya penyediaan infrastruktur TIK berkualitas	'Indek SPBE	Indeks	3,62	3,50	103
	Persentase Aplikasi/website perangkat daerah yang terkoneksi dengan pusat data kabupaten	%	41	85	48,23
Terwujudnya pelaksanaan, penyediaan, pengelolaan dan pelayanan informasi publik secara efektif	Persentase informasi pemerintah yang disampaikan kepada publik	%	100	100	100
Meningkatnya Kualitas Data Pembangunan	Persentase Data Statistik Sektoral	%	100	100	100
Meningkatnya Keamanan Informasi	Persentase Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	%	100	100	100

3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin memperoleh dana yang bersumber dari APBD. Adapun anggaran dana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin pada TA.2024 adalah sebagai berikut :

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran		(%)	(%)
	Anggaran	Realisasi	Keu	Fisik
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.277.135.838	9.185.190.326,00	89,38	98,32
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70.710.000	62.060.000,00	87,77	100
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	41.910.000	37.880.000	90,38	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	28.800.000	24.180.000	83,96	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.836.978.927	5.015.645.999	85,93	100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.836.978.927	5.015.645.999	85,93	100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	155.551.600	132.335.600,00	85,08	100
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	26.040.800	26.040.600	100	100
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	129.511.000	106.295.000	82,07	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.428.805.396	1.382.330.360,00	96,75	100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.887.583	29.152.000	97,54	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	555.192.346	551.070.000	99,26	100
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	49.929.465	49.929.465	100	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	249.991.714	239.164.950	95,67	100
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	124.115.686	119.670.250	96,42	100
Penyediaan bahan/Material	40.000.000	39.712.470	99,28	100
Fasilitasi Kunjungan Tamu	35.280.000	35.000.000	99,21	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	344.408.600	318.631.225	92,52	100
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.533.921	100.422.000,00	99,89	100
Pengadaan Mebel	100.533.921	100.422.000	99,89	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.223.297.744	2.096.743.960,00	94,31	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	400.940.384	400.800.544	99,97	100

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.822.357.360	1.695.943.418	93,06	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	461.258.250	395.652.407,00	85,78	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	304.090.000	253.061.019	83,22	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	107.808.250	107.520.000	99,73	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49.360.000	35.071.388	71,05	100
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	9.791.837.552	8.084.907.853,00	82,57	100
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	9.791.837.552	8.084.907.853,00	82,57	100
Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	864.384.085	773.644.699	89,5	100
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	377.268.000	279.386.197	74,06	100
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	788.039.367	705.551.675	74,93	100
Pelayanan Informasi Publik	401.114.450	248.793.000	75	100
Layanan Hubungan Media	7.125.000.000	5.929.925.000	62,48	100
Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	188.506.700	106.612.532	89,53	100
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	47.524.950	40.994.750	62,03	100
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	7.415.736.718	2.713.819.877,00	83,23	100
Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.684.071.256	2.362.667.406,00	56,56	100
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	6.684.071.256	2.362.667.406	86,26	100
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	731.665.462	351.152.471,00	36,6	100
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	529.100.362	283.008.381	35,35	93,09
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	202.565.100	68.144.090	35,35	92,33
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	1.248.087.368	596.354.615,00	36,03	92,33
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	1.248.087.368	596.354.615,00	0	100

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	139.403.400	54.696.640	0	100
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	477.708.522	123.385.474	47,12	100
Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	630.975.446	418.272.501	90,36	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	1.798.503.243	184.011.912,00	0	100
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.798.503.243	184.011.912,00	0	0
Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	330.421.500	47.553.145	66,71	0
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	627.016.200	89.594.267	47,99	100
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	841.065.543	46.864.500	53,49	100
JUMLAH	33.759.520.734,00	20.764.284.583,00	68,01	98,32

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin ini akan berperan sebagai alat kendali, alat penilaian kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance dalam perspektif yang lebih luas, maka LKjIP ini berfungsi sebagai media pertanggungjawaban instansi kepada publik. Oleh karena itu, LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin ini diharapkan adanya saran – saran dan kritik – kritik yang konstruktif terhadap eksistensi internal dan eksistensi eksternal Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin.

Dengan diterbitkannya LKjIP ini semestinya menjadi landasan fundamental bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin untuk selalu konsisten dan berkelanjutan meningkatkan kualitas kinerjanya, sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Demikian LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 ini dibuat disertai dengan harapan semoga akan menjadi Pedoman Perbaikan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin untuk selalu meningkatkan kinerjanya di tahun – tahun mendatang.

Sekayu, 30 Januari 2025
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



HERRYANDI SINULINGGA, AP
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)
NIP. 19750302 199402 1 002